

Eksistensi Diplomat Indonesia di Forum Majelis Umum PBB 2016-2021 dalam Menghadapi Tuntutan Papua Merdeka Oleh Delegasi Vanuatu

Febriyanti¹, Franky P. Roring²
Ilmu Politik, Universitas Bung Karno, Jakarta

fy409225@gmail.com, frankypst77@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the existence of Indonesian diplomats in answering Vanuatu's questions regarding human rights violations in Papua in the UN General Assembly forum. The ethnic closeness that Vanuatu has with Papua, namely the Melanesian race, is one of the reasons Vanuatu is increasingly massive in supporting the independence of West Papua. This study uses a qualitative descriptive analysis research methodology accompanied by interview data collection techniques as primary data and literature study as secondary data. The conclusion of this study is that the success of Indonesia's diplomacy in the UN General Assembly forum cannot be separated from the ability of Indonesian diplomats to answer and analyze problems that occur in the forum. The attitude and behavior of diplomats is something that is indispensable in the process of diplomacy at the UN General Assembly.

Keywords: Existence of Diplomats, Diplomacy, and Neo-realists.

PENDAHULUAN

Gerakan separatisme Papua menjadi isu yang sangat mencuri perhatian Pemerintah dan Masyarakat Indonesia. Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghendaki pemisahan wilayah Papua dari Indonesia. Sejak bergabungnya Irian Jaya menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk merasa tidak puas dan menginginkan pemisahan wilayah Papua dari Indonesia.¹ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sejarah bergabungnya Papua dengan Indonesia, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, tingkat kemiskinan yang masih tergolong sangat tinggi, keterbelakangan ekonomi serta kegagalan Pemerintah Indonesia dalam membangun kesejahteraan masyarakat didalamnya, sehingga gerakan separatisme di Papua semakin kuat.

Gerakan politik separatisme di Papua semakin mendapatkan dukungan dari beberapa negara Pasifik khususnya negara-negara yang tergabung dalam rumpun Melanesia, seperti Fiji, Solomon Island, New Caledonia, Tuvalu, Nauru dan Vanuatu.

Vanuatu merupakan salah satu negara yang sangat masif menyuarakan dukungannya terhadap gerakan Papua Merdeka dalam forum Majelis Umum PBB. Pengangkatan isu Papua Merdeka yang diangkat oleh Vanuatu sudah menjadi kampanye tahunan yang diangkat oleh negara dengan ibu kota

¹ Papua R., (2012) *"Lima Masalah Mendasar di Papua"*. Papua Review 88, hlm 8.

Port Villa tersebut dalam *High Level Week* sejak tahun 2016 hingga 2021 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Vanuatu sangat gencar dalam mengangkat isu Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua.

Dalam forum tersebut Vanuatu mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan melalui delegasinya kerap menyatakan secara resmi bahwa mereka mengecam tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Indonesia kepada masyarakat Papua. Perdana Menteri Vanuatu dalam pidatonya mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan kepada masyarakat Papua atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Dukungan Vanuatu kepada Kelompok Separatisme Papua dilatarbelakangi oleh hubungan persamaan ras Melanesia, selain itu pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Walter Hadye (1980-1991) mengatakan bahwa “*kemerdekaan Vanuatu tidaklah sempurna sebelum seluruh bangsa dan wilayah Melanesia terbebas dari kolonialisme*”²

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi diplomat Indonesia dalam melakukan diplomasi di forum-forum internasional khususnya forum *United Nation General Assembly*. Melalui keberadaan diplomat Indonesia yang handal dalam forum-forum internasional akan menunjukkan sejauh mana keberhasilan diplomat Indonesia dalam forum tersebut.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diplomasi dengan menggunakan pendekatan neo-realis. Diplomasi menjadi sebuah instrument penting dalam melaksanakan kepentingan nasional suatu negara. Secara teori diplomasi adalah praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara damai.³

Seiring berkembangnya zaman, konferensi menemukan fungsi baru yang tidak hanya membicarakan kepentingan perang.⁴ Lebih luas lagi konferensi digunakan negara-negara anggota saat ini sebagai arena konferensi utama internasional di Majelis Umum PBB untuk membahas

² Rizky Adha Mahendra., (2021), Sejarah Kemerdekaan Negara Vanuatu, Sebuah Negara Kepulauan di Oseania yang Mendukung Kemerdekaan Papua. diupload tanggal 27 September 2022, diakses pada Sabtu 9 April 2022, pukul 14.26 <https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-101283265/sejarah-kemerdekaan-negara-vanuatu-sebuah-negara-kepulauan-di-oseania-yang-mendukung-kemerdekaan-papua?page=all>

³ R.W. Sterling, *Macropolitics*, hlm.223

⁴ KM. Panikkar. , hlm 142

berbagai macam agenda diplomasi selain perang⁵, baik itu mengenai isu *high politics* maupun *low politics*.

Diplomasi multilateral digunakan oleh negara-negara kecil seperti Vanuatu untuk mengkomunikasikan pendapat dan memperjuangkan kepentingannya di arena internasional. Diplomasi tersebut sangat diperlukan untuk menarik simpati internasional dan menggalang sekutu-sekutu agar dapat membela kepentingannya.

Diplomasi Multilateral ditandai dengan adanya beragam masalah yang dibahas dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ada beberapa alasan Vanuatu sebagai negara kecil menggunakan diplomasi multilateral sebagai berikut:

- a. Diplomasi multilateral merupakan kesempatan terbaik untuk melakukan perundingan;
- b. Negara kecil memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada negara lain yang berada dalam forum;
- c. Konferensi multilateral adalah forum yang bisa digunakan negara-negara kecil untuk menyampaikan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama negara lain;
- d. Semua pihak hadir dan mengupayakan jalan keluar mengenai suatu masalah;
- e. Dalam diplomasi multilateral akan terjadi informalitas antarnegara peserta untuk membahas masalah-masalah di luar agenda formal;
- f. Mendapat dukungan luas;⁶

Dalam mencapai kepentingannya, sebuah negara memerlukan individu atau kelompok yang ditunjukkan kepada negara lain untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, serta pemerintah dalam mencapai kepentingan nasional negaranya. Para diplomat bukan saja seorang yang melakukan negosiasi dengan negara lain untuk melaksanakan hubungan diplomatik negaranya, tetapi diplomat mencakup semua abdi negara di bidang hubungan diplomatik baik yang bertugas di dalam Departemen Luar Negeri maupun anggota kedutaan dan kantor perwakilan lainnya di luar negeri.⁷

Realisme struktural berfokus pada sistem internasional. Menurut Waltz struktur dari sistem dan variasi yang ada didalamnya mempengaruhi interaksi dari unit-unit dan hasil yang mereka produksi. Sistem internasional muncul akibat dari interaksi antarnegara dan kemudian membatasi negara-negara tersebut untuk mengambil tindakan tertentu.⁸

⁵ Klifahmi Amran, "*Politik Melanesia dan Diplomasi Indonesia*", hlm. 25 (diakses: Kamis, 24 maret 2022, pukul 03.29 <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17209>)

⁶ Rumintang, Lusiana (2009), "*Bekerja Sebagai Diplomat*", Jakarta; Erlangga, hlm 30-32

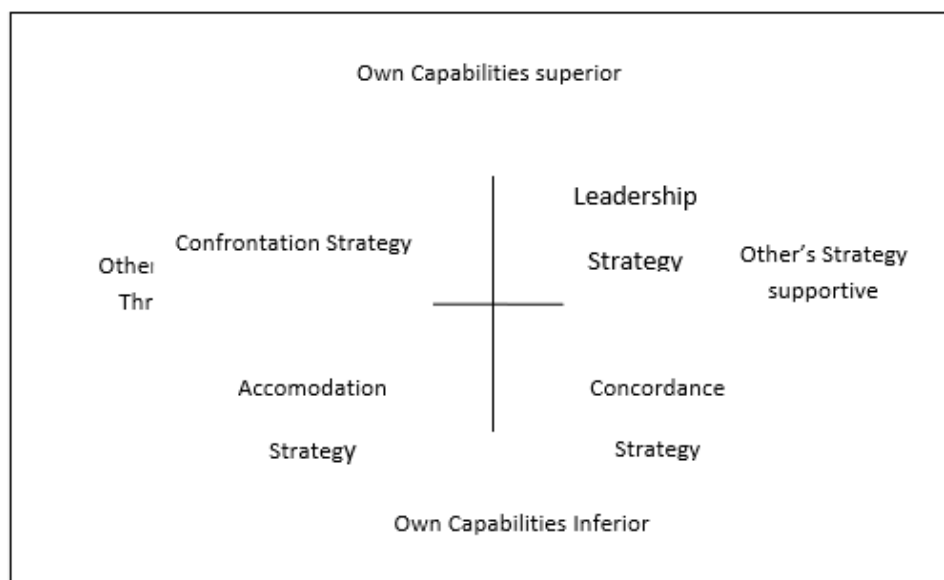
⁷ Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun(1993), "*Indonesia dan Komunikasi Politik*", Jakarta: Gramedia, hlm 239

⁸ Kenneth N. Waltz, (2019) *Realism and International Politics*, (New York: Routledge, 2008) hlm 73-74 dalam dasar-dasar hubungan internasional dr. umar Suryadi Bakry, Prenadamedia Group, Jakarta hlm 97

Struktur yang dimaksud berarti kombinasi antara struktur dan unit-unit atau negara-negara saling berinteraksi karena prinsip-prinsip yang mengaturnya. Prinsip ini didefinisikan oleh Waltz sebagai anarki yaitu tidak ada etnisitas negara yang dapat memaksa keputusannya, karena anarki dikatakan sebagai *the only game on the town*. Perilaku negara cenderung seragam, tidak peduli besar atau kecilnya, maju atau berkembang, demokrasi maupun tidak demokrasi semuanya memiliki perilaku seragam yaitu mencapai tujuan keamanan negaranya dalam pencaturan dunia internasional.⁹

Untuk menjamin sebuah kamanan, negara harus memiliki dua strategi yaitu *balancing* dan *bandwagoning*. Negara-negara kecil biasanya menggunakan *bandwagoning* sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan lebih penghargaan, perlindungan, akses sumber daya dan sebagainya. Cara ini digunakan negara kecil karena mereka menyadari sulit untuk melakukannya dengan cara *balancing*.¹⁰

Pengaruh menurut Alvin z. Rubenstein merupakan hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi tertentu sebagai sumber. Dalam hal ini terdapat keterkaitan yang kuat antara sumber dengan hasil¹¹ Maka dari itu apakah negara tersebut berada dalam posisi *Own Capabilities Superior* atau *Own capabilities Inferior* akan sangat bergantung pada negara tersebut mempersepsikan diri (negara nya) yang ditunjukkan kepada negara lain.



⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kenneth Waltz, *theory of international Politics* (reading, MA:Addison-Wesley, 1979), hlm 1 dalam Mohammad Rasyiding "20 buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh"Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018, hlm. 112

¹¹ Lovel dalam Franky P. Roring (2018), "Retorika Soekarno dalam Komunikasi Internasional Anti Imperialisme dan Kapitalisme", Universitas Bung Karno hlm. 52

Gambar 4 1 Policy makers' estimates of the strategy of another nation states and estimates of their own relative capabilities as determinants of the style of interaction

(Sumber: Lovell, 1970, hal 99)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian secara deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yeknik wawancara dengan perwakilan Tetap Republik Indonesia Rayyanul Sangadji selaku *Councillor* PTRI New York, dan juga Sindy Nur Fitri selaku Sekretaris II Perwakilan Tetap Republik Indonesia. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna-makna yang menurut sejumlah atau sekelompok individu berasal dari kejadian sosial atau kemanusiaan.¹² Pada teori diplomasi yang menggunakan pendekatan neo-realis. Teknik pengumpulan data yag digunakan adalah studi kepustakaan, dan wawancara. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis buku, literature dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin disampaikan. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan membahas terkait diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia di Majelis Umum PBB untuk menjawab pertanyaan Vanuatu secara konsisten pada tahun 2016-2021.

Menurut perspektif *the politics of power and security*, negara sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan politik internasional yang diwakili oleh sekelompok elit untuk menjalankan politik luar negeri masing-masing negara untuk mencapai kepentingannya. Tenaga elit professional tersebut berasal dari orang-orang ahli yang bekerja dalam Departemen Luar Negeri yang ditugaskan langsung

¹² Papua R., (2012) "*Lima Masalah Mendasar di Papua*". Papua Review 88, hlm 8.

untuk melakukan hubungan dengan negara lain yang disebut sebagai diplomat, sedangkan jalur komunikasi yang biasa dipakai dalam interaksi dengan negara lain disebut sebagai diplomasi.¹³

Seiring berkembangnya zaman, organisasi Internasional seperti PBB menemukan fungsi baru yang tidak hanya membicarakan kepentingan perang.¹⁴ Lebih luas lagi forum internasional digunakan negara-negara anggota saat ini sebagai arena konferensi utama internasional di Majelis Umum PBB untuk membahas berbagai macam agenda diplomasi selain perang,¹⁵ baik itu mengenai isu *high politics* maupun *low politics*.

Dengan menggunakan diplomasi multilateral dalam forum Sidang Majelis Umum PBB, negara kecil seperti Vanuatu menggunakan kesempatan tersebut sebagai wadah untuk melakukan perundingan untuk mencapai kepentingan negaranya, jika dilihat dari kapabilitas dan geografis negara yang tergolong kecil, forum tersebut merupakan sebuah kesempatan Vanuatu untuk mengangkat isu Separatisme Papua agar dapat menyampaikan berbagai masalah atau isu yang menyangkut kepentingan negaranya bersama dengan negara-negara lain yang berada didalam forum tersebut

Jika dilihat dari kondisi geografis negaranya, Vanuatu memiliki bentuk geografis yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, sehingga bentuk diplomasi tersebut merupakan diplomasi yang tepat digunakan negara Ibu Kota Port Villa tersebut untuk menyampaikan isu Papua Merdeka kepada negara lain yang berada dalam forum UNGA. Meskipun isu separatisme Papua bukan menjadi isu utama yang dibahas dalam forum tersebut setiap tahunnya, namun Vanuatu tetap mengangkat isu tersebut yang bertujuan untuk menginternasionalisasikan isu Papua agar menjadi *list issue* di PBB.

Strategi diplomasi Indonesia dalam sejarahnya tidak berdiri sendiri. Diplomasi Indonesia adalah praktik pelaksanaan politik luar negeri dengan landasan konstitusionalnya pada Pembukaan UUD (Undang – Undang Dasar) 1945.¹⁶ Dalam Pembukaan UUD 1945 termuat amanat kemana arah dan bentuk diplomasi Indonesia yang mesti dijalankan oleh para diplomat yang diutus secara resmi oleh negara. Tokoh-tokoh diplomat tidak hanya berjasa dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan, tetapi juga berperan penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan menurut Harold Nicholson bahwa diplomasi dijalankan berdasarkan 5 hal yaitu: (1) politik luar negeri; (2) negosiasi; (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi; (4) cabang Dinas Luar Negeri; dan (5) keahlian pelaksanaan diplomasi. Sehingga bisa dikatakan salah satu keberhasilan diplomasi tergantung bagaimana diplomasi tersebut dijalankan, yaitu

¹³ Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun (1993), "Indonesia dan Komunikasi Politik", Jakarta: Gramedia, hlm. 239

¹⁴ KM. Panikkar. *Op. cit.*, hlm 142

¹⁵ Amran, Klifahmi. *Politik Melanesia dan Diplomasi Indonesia*, hlm. 25 (diakses: Kamis, 2 Juni 2022, pukul 03.29

¹⁶ UUD No. 37 tahun 2009

mengenai keahlian pelaksanaan diplomasi. Para diplomat harus memiliki keahlian, sikap dan perilaku yang sesuai untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya¹⁷.

Mengacu pada informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Rayyanul Sangadji dan Sindy Nur Fitri. hak jawab yang digunakan dalam Sidang Majelis Umum PBB merupakan sebuah prosedur yang harus dilakukan para diplomat, dimana jika ada pertanyaan yang dilontarkan sebuah negara yang ditunjukkan kepada negara tersebut maka negara yang bersangkutan harus menjawab apa yang ditanyakan oleh negara tersebut.

Dalam menjawab apa yang dipertanyakan Vanuatu, Indonesia menggunakan hak jawabnya dalam sidang tersebut. Para diplomat harus memiliki sikap dan perilaku yang mendukung agar dapat memperlancar jalannya diplomasi, seperti rasa humor yang baik, kreativitas dan keluwesan, percaya diri dan antusiasme yang tinggi, ketegasan dan instuisi, ketulisan, tidak cepat tersinggung dan mampu bekerjasama dalam tim, memiliki pengetahuan yang luas, ulet dan memiliki visi yang jelas berani, teliti, memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, pandai bernegosiasi serta menguasai bahasa asing.

Pada saat menjalankan tugasnya para diplomat harus teliti dan berani dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan bahwa isu yang dilontarkan Papua dalam forum tersebut tidaklah mendasar, dan hal tersebut telah melanggar piagam PBB dan hukum internasional terkait dengan intervensi kedualatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya yang dilakukan Vanuatu.

Selain itu para diplomat juga dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan mampu bernegosiasi dengan menggunakan bahasa asing. Seorang diplomat harus memiliki kepiawaian dalam menafsirkan dan menganalisis apa yang akan terjadi dalam forum, mengkomunikasikan arti penting dan maksud dari pesan yang mereka sampaikan, pesannya harus bersifat fakta, akurasi dan memiliki kebenaran didalamnya. Karena pidato yang dibawa oleh diplomat merupakan salah satu faktor utama yang memberikan peran penting dalam mengubah atau pun mempertahankan sentimen maupun pemikiran tentang identitas negara dalam suatu forum.¹⁸ Sehingga dalam menjalankan politik luar negeri, para diplomat harus memiliki strategi pencapaian kepentingan nasional yang terwujud tergantung pada strategi dan gaya diplomasi yang dilakukan.

Diplomat Indonesia memegang peran penting dalam menjalankan diplomasi untuk menjaga citra positif negara Indonesia. Keberhasilan diplomasi yang dilakukan para wakil negara dalam forum tidak terlepas dari bagaimana peran para diplomat tersebut dalam menyampaikan isi pesan yang mereka sampaikan. Melalui hak jawab Indonesia para diplomat menggunakan kesempatannya dalam menjawab pertanyaan yang ditunjukkan Vanuatu kepada Indonesia mengenai pelanggaran HAM

¹⁷ Nicholson, *loc. cit*

¹⁸ Teuku dalam Franky (2018), "*Retorika Soekarno dalam Komunikasi Internasional Anti Imperialisme dan Kapitalisme*", Vol. 1. No.1 hlm. 53-58

yang terjadi di Papua. Tindakan Indonesia yang menempatkan diri dengan menguasai forum dengan pidato diplomat, menunjukkan bahwa Indonesia menyadari bahwa Indonesia berada dalam *own capabilities superior*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lovel, sikap suatu negara bagaimana dia mempersepsikan hal tersebut didalam forum.¹⁹

Dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan perwakilan PTRI New York, beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau menjawab apakah Indonesia menyadari bahwa itu adalah negara besar, sebenarnya iya bukan menyadari tapi kita harus bersikap seperti negara besar. Tadi kamu bilang luas negara besar, ekonomi dan militer besar. Tapi di PBB kebesaran itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membuli negara lain karena di PBB setiap negara memiliki hak yang sama, kalau dalam voting meskipun dia negara kecil atau besar kita memiliki jumlah voting yang sama.”

Hal ini menegaskan menyadari dan bersikap sebagai negara besar, merupakan strategi yang digunakan bahwa *own capability superior* posisi Indonesia atas isu di Majelis Umum PBB, yang mampu menjadi pemimpin opini, dalam forum tersebut menempatkan posisi strategi kebijakan *taked leadership*, menyadari keberadaannya yang memiliki kapabilitas, Indonesia mengambil posisi pemimpin, dalam Majelis Umum PBB terkait pemimpin opini dalam isu Papua merdeka. keberadaan ini tidak hanya ditentukan karena Indonesia juga merupakan negara besar, dikawasan, namun juga direpresentasikan melalui kapabilitas diplomatnya di forum PBB tersebut. Para diplomat Indonesia tidak hanya menyampaikan pesan, melainkan pesan itu sendiri. profesionalitas, mereka telah menunjukkan, bahwa mereka adalah orang - orang terpilih untuk pekerjaan terpilih.

Seorang diplomat sebagai seorang negosiator dan pembicara dalam forum UNGA mampu menunjukkan kredibilitas negara yang diwakilinya. Diplomat harus meyakini apa yang disampaikan dalam forum, pesan yang disampaikan harus berupa fakta dan mampu mempengaruhi persepsi para komunikan.

Zainul Maarif menyatakan tak ada seorangpun yang dapat berbicara tertib tanpa proses berfikir tertib dan tidak ada orang yang bisa menulis secara sistematis tanpa berfikir sistematis. Menurut Aristoteles sebagai bapak retorika menyatakan bahwa bujukan secara teknis dapat berhasil dengan rekayasa tiga hal, yaitu: (1) karakter pembicara, (2) emosi pendengar, (3) perkataan yang disampaikan. Masing-masing dari ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah *ethos*, *pathos* dan *logos*.

Berdasarkan pandangan Kenneth Waltz terkait dengan pendekatan neo-realis, dimana setiap negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional saling berinteraksi karena prinsip-prinsip yang mengaturnya. Diplomasi multilateral yang dilakukan Vanuatu merupakan diplomasi yang tepat,

¹⁹ Lovel dalam Franky P. Roring, *“Retorika Soekarno Dalam Komunikasi Internasional Anti imperialism dan Kapitalisme”*, jurnal, 2018, vol 1, 2615-0743, hlm 52 diakses pada 14 juli 2022 pukul 20.15

karena hal tersebut sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki Vanuatu saat ini. Terlepas dari besar kecilnya pengaruh dan sumber daya yang dimiliki Vanuatu, Indonesia perlu menghargai apa yang dilakukan Vanuatu untuk mengangkat isu Papua Merdeka di Forum MU PBB.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti berikan, maka sebagai kesimpulan dari pembahasan ini yaitu mengenai keberhasilan diplomasi Indonesia di forum internasional menunjukkan eksistensi diplomat Indonesia dalam memainkan perannya secara signifikan dan berarti. Terkait dengan reaksi dari forum PBB yang tetap tidak mempersoalkan dan tidak menjadikan isu Papua Merdeka menjadi *list issue* yang dibahas dalam forum yang lebih tinggi.

PENUTUP

Pada penelitian ini eksistensi diplomat memegang peranan penting agar terlaksananya dan tercapainya diplomasi yang baik. Dalam menghadapi pertanyaan tersebut kemampuan *soft skill* diplomat sangat dibutuhkan, yaitu sikap dan perilaku yang dimiliki diplomat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam proses jalan diplomasi di Majelis Umum PBB. Kemampuan menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan yang disampaikan melalui kehadiran diplomat Indonesia yang handal dalam forum menunjukkan keberhasilan diplomasi yang dilakukan diplomat dalam forum tersebut. keberhasilan diplomasi Indonesia ditentukan atas keberadaan Indonesia sebagai negara yang disebagani dikawasan, dan berikut eksistensi atau keberadaan diplomat Indonesia diforum PBB atas penguasaan isu Papua Merdeka dan mampu menjadi pemipin opini dalam forum tersebut, sehingga isu yang di angkat Vanuatu tidak mejadi pembahasan utama dalam forum tersebut.

Selain peran dari diplomat Indonesia dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Vanuatu dan negara - negara kawasan polynesia, sehingga prinsip *one thousand friends zero enemy* dapat diwujudkan, peran Pemerintah Indonesia juga diperlukan untuk melakukan diplomasi yang baik dengan menekankan *culture diplomacy*, baik *people to people*, hubungan bilateral, hubungan multilateral maupun hubungan internasional yang baik dalam forum maupun diluar forum. Perlu adanya pendekatan yang lebih tepat dengan masyarakat Papua, dan mengetahui apa yang menjadi tuntutan masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Klifahmi. (2017), *Politik Melanesia dan Diplomasi Indonesia (Studi Analisis: Geopolitik dan Geostrategi Separatisme di Papua Pasca Sidang Majelis Umum PBB ke-70*. Universitas Sumatera Utara.
- Fitri, Nur S. (2022, Juli 29). Diplomasi Indonesia dalam Menghadapi Tuntutan Papua Merdeka Oleh Delegasi Vanautu (Studi Analisis: Peran Diplomat Indonesia dalam forum *United Nation General Assembly* (Majelis Umum PBB tahun 2016-2021), (Febriyanti, interviewer)
<https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-101283265/sejarah-kemerdekaan-negara-vanuatu-sebuah-negara-kepulauan-di-oseania-yang-mendukung-kemerdekaan-papua?page=all>
- Kaufman, Joyce (2015), “*Introduction to international relations theory and practices*”, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers.
- Kenneth N. Waltz (2008), “*Realism and international Politics* (New York: Routledge)
- Kenneth Waltz (2018) *theory of international Politics* (reading, MA: Addison-Wesley, 1979), hlm 1 dalam Mohammad Rasyiding “*20 buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh*” Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Kenneth Waltz, (1997) “*Theory of International Politics*”, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Roring, Franky P, (2018) “*Retorika Soekarno Dalam Komunikasi Internasional Anti imperialism dan Kapitalisme*”, jurnal, 2018, vol 1, 2615-0743, May, Teunku Rudy. 1993. Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional. Bandung: Angkasa,
- Mahendra, Rizky Adha., (2021), *Sejarah Kemerdekaan Negara Vanuatu, Sebuah Negara Kepulauan di Oseania yang Mendukung Kemerdekaan Papua*.
- Nicholson, Harold, *Diplomacy*, London, 1942
- Panikkar, KM. Ed. Harwanto dan Misrawati. 1995. *The Principle and Practice Diplomacy*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Papua R., (2012) “*Lima Masalah Mendasar di Papua*”. Papua Review 88.
- R.W. Sterling, *Macropolitics*.
- Roring, F. P. (2018). *Retorika Soekarno Dalam Komunikasi Internasional Anti Imperialisme Dan Kapitalisme*. Oratio Directa, 1(1).
- Rumintang, Lusiana (2008), “*Bekerja Sebagai Diplomat*”, Jakarta; Erlangga, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (1993), “*Indonesia dan Komunikasi Politik*”, Jakarta: Gramedia.

Sangadji, Rayyanul (2022, Juli 29). Diplomasi Indonesia dalam Menghadapi Tuntutan Papua Merdeka Oleh Delegasi Vanautu (Studi Analisis: Peran Diplomat Indonesia dalam forum *United Nation General Assembly* (Majelis Umum PBB tahun 2016-2021), (Febriyanti, interviewer)

Teuku dalam Franky (2018), “ *Retorika Soekarno dalam Komunikasi Internasional Anti Imperialisme dan Kapitalisme*, Vol. 1. No.1

UUD No. 37 tahun 2009

Waltz, S, (1985), “*Aliance Formation and The balance of world power*”, International Security